



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jalan Mayjen D. I. Pandjaitan No.24 Banjarmasin
Telepon : (0511) 3354224-3354226 Faksimil : (0511) 3354834
e-mail : kanwilbanjarmasin@perbendaharaan.go.id
Website : www.djpbn-kalsel.net

Nomor : S- 928/WPB.19/BD.02/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2018

14 Mei 2018

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
u.p.
Direktur Pelaksanaan Anggaran
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lt. 4
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini kami sampaikan Laporan Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2018 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Softcopy Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2018 tersebut telah kami kirimkan terlebih dahulu melalui email : ditpa@kemenkeu.go.id dan tembusan lo.ditpa@gmail.com mendahului pengiriman *hardcopy*-nya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Kepala Kantor,

Usdek Rahyono
NIP 19601014 198010 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I
2018

Penyusun:

Penanggung Jawab : Usdek R. | Ketua Tim : Purwadhi A. | Editor : Arief R. |
Design Grafis : Rintok J. | Anggota : Setyo Juri | Tiyar | Padlansyah | Lili M. |
Noor Effendi | Saadah | Saniansyah

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Kalimantan Selatan

DAFTAR ISI

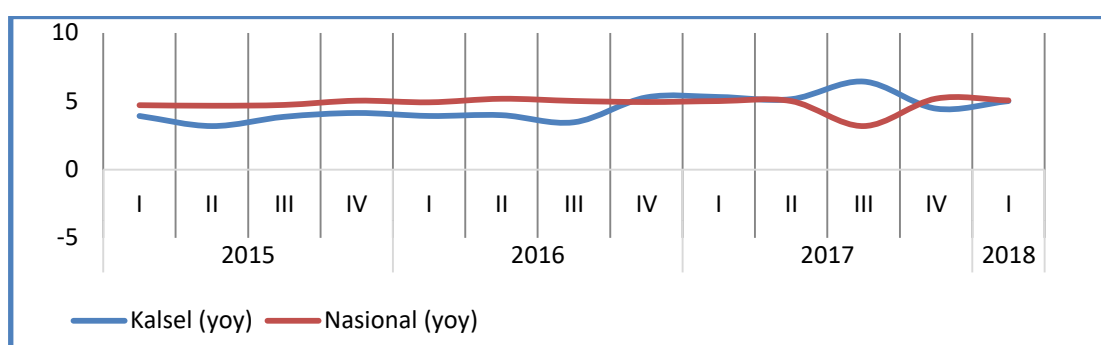
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	1
A. Produk Domestik Regional Bruto	1
B. Inflasi.....	2
C. Indikator Kesejahteraan	2
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	3
A. Pendapatan Negara	4
B. Belanja Negara	7
C. Prognosis Realisasi APBN.....	12
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	13
A. Pendapatan Daerah	14
B. Belanja Daerah	17
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	19
V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH	25
A. Pertumbuhan Ekonomi Kalsel 2018 Menjanjikan.....	25
B. Program Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Selatan Tahun 2018.....	25

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan memasuki triwulan I 2018 mengalami pertumbuhan positif dimana PDRB Kalimantan Selatan secara year on year (yoy) mencapai 5,01 persen. Angka ini sedikit menurun dibandingkan dengan PDRB Kalimantan Selatan Triwulan I 2017 (yoy) sebesar 5,31 persen. Laju PDRB Kalimantan Selatan triwulan I 2018 (yoy) juga lebih rendah dibandingkan dengan PDB Nasional (yoy) yang mencapai 5,06 persen.

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Kalsel 2015-2018



Sumber: BPS Prov. Kalsel

Perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan I-2018 diukur dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp39,81 triliun. Dari sisi pengeluaran, semua komponen domestik tumbuh positif (yoy) termasuk pengeluaran konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga yang tinggi dan kinerja net ekspor menjadi penopang pertumbuhan pada triwulan ini.

Tabel 1.1. PDRB Kalimantan Selatan Sisi Permintaan Triwulan I 2018

No.	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
		Triw I 2017	Triw I 2018	Triw I 2017	Triw I 2018
1	Konsumsi RT	18.062,55	19.365,94	13.875,02	14.506,91
2	Konsumsi LNPRT	365,56	412,89	256,66	282,37
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.612,64	3.780,00	2.445,61	2.496,44
4	PMTB	8.649,42	9.446,88	6.259,36	6.636,44
5	Perubahan Inventori	436,09	385,11	359,65	281,73
6	Ekspor Barang & Jasa	25.873,52	30.625,70	21.808,89	22.601,80
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	20.388,84	24.202,84	16.651,90	17.032,52
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		36.610,95	39.813,74	28.353,28	29.773,17

Sumber: BPS Prov. Kalsel

B. Inflasi

Pada bulan Maret 2018, Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,35 persen, laju inflasi kalender tahun 2018 (Maret 2018 terhadap Desember 2017) sebesar 0,47 persen dan laju inflasi “year on year” sebesar 3,12 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain angkutan udara, nasi dengan lauk, biskuit, bensin, dan bawang merah. Dari kota-kota IHK di wilayah pulau Kalimantan yang mengalami inflasi ada 7 kota. Inflasi tertinggi terjadi di kota Tanjung sebesar 0,83 persen dan inflasi terendah di kota Singkawang sebesar 0,19 persen. Terdapat dua kota yang mengalami deflasi yaitu kota Samarinda sebesar 0,12 persen dan kota Tarakan sebesar 0,03 persen. Angka inflasi yang terkendali ini tidak terlepas dari strategi Pemerintah bersama TPID dalam mengendalikan harga, khususnya dari sisi penyediaan pasokan.

C. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan sosial Kalimantan Selatan tahun 2018 sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan

Statistik kemiskinan tahun 2018 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

2. Gini Ratio

Gini rasio tahun 2018 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT Kalimantan Selatan keadaan Februari 2018 adalah 3,86 persen. Indikator ini mengalami kenaikan sebesar 0,33 poin dibandingkan keadaan Februari 2017 yang sebesar 3,53 persen. Hal ini diakibatkan adanya penambahan jumlah angkatan kerja serta ditunjang oleh sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja terbanyak belum memasuki masa panen. Dibandingkan dengan angka secara nasional yang mencapai 5,13 persen, TPT Kalimantan Selatan relatif lebih baik.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kalimantan Selatan Tahun 2017 adalah 69.65. Indikator ini mengalami kenaikan sebesar 0,60 poin dibandingkan keadaan Tahun 2016 yang sebesar 69,05. Semua komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan. Namun demikian, IPM Kalimantan Selatan masih berada di bawah rata-rata angka secara nasional yang mencapai 70,81.

BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Alokasi belanja negara pada APBN di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 sebesar Rp24,03 triliun dan target pendapatan negara sebesar Rp9 triliun. Rincian selengkapnya pada tabel II.1 di bawah ini.

Tabre II.1
APBN Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 (dalam Miliar)

Uraian	Triwulan I Tahun 2017			Triwulan I Tahun 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
A. PENDAPATAN NEGARA	9,666	1,809	18.72%	9,063	1,674	18.47%
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	9,666	1,809	18.72%	9,063	1,674	18.47%
1. Penerimaan Pajak	8,952	1,566	17.49%	8,247	1,380	16.73%
2. PNBPN	714	243	34.03%	816	294	36.03%
II. HIBAH	-	-	0.00%	-	-	0.00%
B. BELANJA NEGARA	30,127	5,057	16.79%	24,031	5,218	21.71%
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	7,994	1,138	14.24%	7,498	1,090	14.54%
1. Belanja Pegawai	3,152	609	19.32%	3,068	587	19.13%
2. Belanja Barang	2,814	349	12.40%	2,707	396	14.63%
3. Belanja Modal	1,976	178	9.01%	1,712	107	6.25%
4. Belanja Hibah	22	-	0.00%	-	-	0.00%
5. Belanja Bantuan Sosial	30	2	6.67%	11.0	-	0.00%
6. Belanja Lain-lain	-	-	0.00%	-	-	0.00%
II. TKDD	22,133	3,919	17.71%	16,533	4,128	24.97%
1. Transfer ke Daerah	20,703	3,919	18.93%	15,216	3,774	24.80%
a. DAU	7,935	2,664	33.57%	7,971	2,650	33.25%
b. DBH	9,176	744	8.11%	3,480	636	18.28%
c. DAK Fisik	1,240	-	0.00%	1,296	14	1.08%
d. DAK Non Fisik	2,067	511	24.72%	2,138	361	16.88%
e. DID	285	-	0.00%	331	113	34.14%
2. Dana Desa	1,430	-	0.00%	1,317	354	26.88%
C. SURPLUS DEFISIT	(20,461)	(3,248)	15.87%	(14,968)	(3,544)	23.68%

Sumber: Kanwil DJP Kalselteng, Kanwil DJBC Kabagsel, GFS dan OM SPAN (diolah)

Alokasi APBN 2018 tersebut diharapkan dapat lebih kredibel, efisien, efektif dan berkesinambungan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dari tabel di atas terlihat bahwa dari sisi pendapatan negara, sebagian besar (91%) target pendapatan negara masih berasal dari penerimaan perpajakan. Adapun porsi PNBPN (termasuk pendapatan BLU), masih belum signifikan, karena hanya sebesar 9%. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya intensifikasi pungutan PNBPN, maupun ekstensifikasi potensi jenis-jenis PNBPN baru. Adapun alokasi belanja dari APBN untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 sebagian besar berupa alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 69% dan belanja sektoral hanya

31%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan membandingkan data pendapatan dan belanja, terlihat bahwa di wilayah Kalimantan Selatan masih menerima lebih banyak alokasi belanja dari APBN dari pada target penerimaan yang harus disetor ke kas negara. Hal itu merupakan modal bagi pembangunan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar Rp1,3 triliun atau 16,8% dari target 2018. Perkembangan penerimaan perpajakan selama triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Realisasi Penerimaan Perpajakan s.d. Triwulan I Tahun 2018 (dalam Miliar)

Jenis Pajak	Januari	Februari	Maret	Jumlah
PPh	332	269	341	941
PPN	184	85	126	395
PBB	11	3.6	1.2	16
Cukai	0.2	-	0.2	0.4
Pajak Lainnya	5.9	6.1	6.0	18
Bea Masuk	4.3	2.2	0.8	7.3
Bea Keluar	0.9	0.4	0.8	2.1
Jumlah	539	366	476	1,380

Sumber: GFS, OM SPAN (diolah)

Realisasi penerimaan PPh pada bulan Januari cukup besar sebagai akibat adanya tambahan penghasilan pada akhir tahun (pembayaran bonus dll) yang baru dibayarkan pajaknya pada bulan Januari. Adapun di bulan Maret juga menunjukkan peningkatan akibat batas akhir SPT Tahunan, termasuk pembayaran kekurangan pajak. Kondisi tersebut sejalan dengan siklus pembayaran pajak di Indonesia. Adapun penerimaan PPN di bulan Januari juga cukup besar karena adanya perayaan-perayaan di bulan Desember dan Januari.

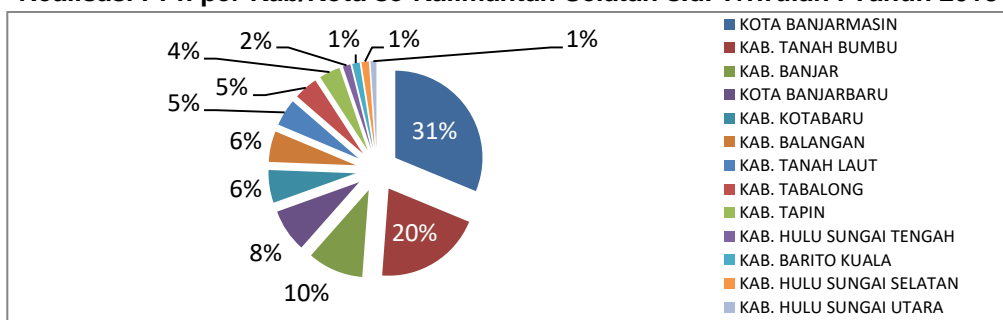
a) Pajak Penghasilan (PPh)

Dari tabel II.2 terlihat bahwa penerimaan PPh masih merupakan sumber utama penerimaan perpajakan di Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 68% dari total penerimaan perpajakan. Sebagian besar penerimaan PPh (48%) berasal dari PPh pasal 21 dan PPh Pasal 23. Hal itu sejalan dengan kondisi perekonomian Kalimantan Selatan, dimana sektor pertambangan merupakan penyumbang terbesar PDRB (21,5%). Sumber PPh dari sektor

pertambangan antara lain berupa PPh pasal 21 pegawai tetap, pegawai tidak tetap, orang pribadi yang bukan pegawai atas upah yang diterimanya. Adapun PPh pasal 23 antara lain bersumber dari kegiatan *land clearing*, jasa pengeboran dan penggalian, jasa pengolahan dan jasa pengangkutan.

Dari 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, kota Banjarmasin dan kabupaten Tanah Bumbu merupakan penyumbang 51% penerimaan PPh. Kabupaten Tanah Bumbu memang menjadi salah satu pusat kegiatan pertambangan. Adapun kota Banjarmasin sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan merupakan lokasi kantor pusat perusahaan di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, meskipun lokasi usahanya di luar kota Banjarmasin, penerimaan PPh nya akan tercatat di kota Banjarmasin.

Grafik II.1
Realisasi PPh per Kab/Kota se-Kalimantan Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2018



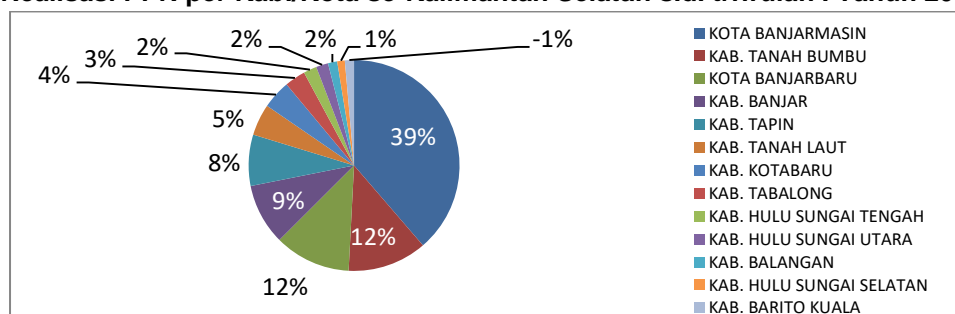
Sumber: Kanwil DJP Kalselteng (diolah)

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan PPN merupakan sumber kedua terbesar penerimaan perpajakan di Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 28% dari total penerimaan perpajakan. Sebagian besar penerimaan PPN berasal dari PPN dalam Negeri (96,6%). Kondisi ini menggambarkan selain sektor pertambangan, perekonomian Kalimantan Selatan juga ditopang oleh sektor Industri (14,53%), dan perdagangan (9,7%). Adapun penerimaan PPN BM tidak banyak (0,64%) dari total penerimaan PPN karena jumlah pabrikan barang mewah tidak banyak di Kalimantan Selatan.

Dari 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, kota Banjarmasin, kabupaten Tanah Bumbu dan kota Banjarbaru merupakan penyumbang 63% penerimaan PPN. Kontribusi Kabupaten Tanah Bumbu sebagian besar dari sektor pertambangan. Adapun kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru menyumbang dari sektor industri dan perdagangan yang merupakan karakteristik kedua wilayah tersebut.

Grafik II.2
Realisasi PPN per Kab./Kota se-Kalimantan Selatan s.d. triwulan I Tahun 2018



Sumber: Kanwil DJP Kalselteng (diolah)

c) Pajak Perdagangan Internasional dan Cukai

Dari tabel II.2 di atas, sebagian besar penerimaan Pajak Perdagangan Internasional berasal dari Bea Masuk (78%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.3
Realisasi Pajak Perdagangan Internasional s.d. Triwulan I Tahun 2018 (Miliar)

Jenis Pajak	Januari	Februari	Maret	Jumlah
Bea Masuk	4.3	2.2	0.8	7.3
Bea Keluar	0.9	0.4	0.8	2.1
Jumlah	5.2	2.6	1.6	9.4

Sumber: Kanwil DJBC Kabagsel, OM SPAN (diolah)

Bea Masuk antara lain berasal dari bea masuk alat berat, spare part, serta barang modal pertambangan. Adapun Bea Keluar antara lain berasal dari ekspor biji besi, vinyl, dan produk olahan kayu.

Adapun penerimaan cukai sebesar Rp420 juta berasal dari denda atas penindakan rokok ilegal di Kalimantan Selatan. Kanwil DJPBC Kabagsel berupaya menekan peredaran rokok ilegal (tanpa cukai) secara bertahap, sesuai target maksimal hanya 6% rokok ilegal yang beredar.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBPN di Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan I tahun 2018 adalah sebesar Rp293,9 miliar atau 36,03% dari target tahun 2018 sebesar Rp816 miliar. Komposisi PNBPN di wilayah Kalimantan Selatan terdiri dari PNBPN Lainnya (PNBPN K/L) sebesar 98% dan PNBPN BLU sebesar 2%. Adapun perkembangan realisasi PNBPN selama triwulan I 2018 adalah sebagai berikut:

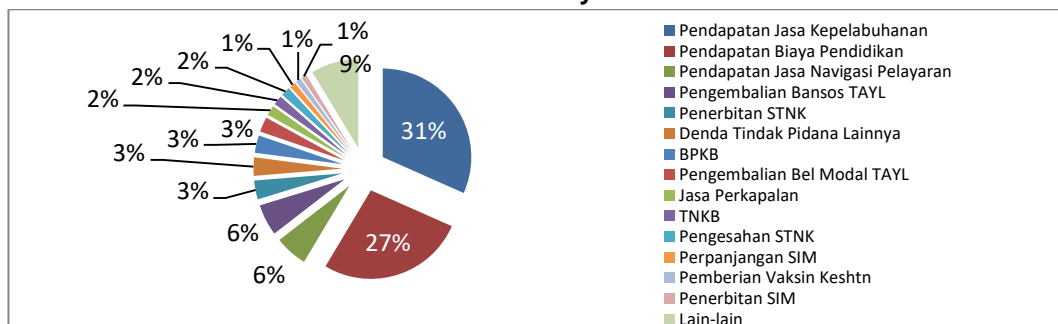
Tabel II.3
Realisasi PNBPN s.d. Triwulan I Tahun 2018 (dalam Miliar)

Jenis PNBPN	Januari	Februari	Maret	Jumlah
PNBPN Lainnya	73.29	90.73	123.08	287.1
PNBPN BLU	-	-	6.8	6.8
Jumlah	73.29	90.73	129.94	293.9

Sumber: GFS dan OM SPAN (diolah)

PNBP Lainnya yang merupakan PNBP dari K/L sebagian besar bersumber dari Pendapatan Jasa Kepelabuhanan (31%) dan Pendapatan Biaya Pendidikan (27%). Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut:

Grafik II.3
Persentase Realisasi PNBP Lainnya s.d. triwulan I Tahun 2018



Sumber: GFS dan OM SPAN (diolah)

Dari grafik di atas, terlihat bahwa potensi PNBP di Kalimantan Selatan masih bisa dikembangkan. Saat ini sumber utama PNBP Kalimantan Selatan baru berasal dari satker Kementerian Perhubungan, Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian Agama. Diharapkan satker dari Kementerian Negara/Lembaga lainnya juga mulai melakukan optimalisasi PNBP, misalnya melalui pemanfaatan BMN, serta layanan SIM dan STNK.

B. Belanja Negara

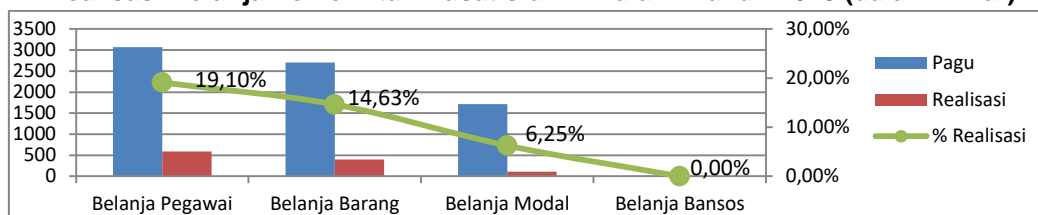
Belanja negara merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk menjalankan stimulus fiskal. Stimulus fiskal yang sering disertai dengan kebijakan anggaran defisit, juga mencerminkan kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam menggerakkan sektor riil.

Adapun belanja negara lingkup Provinsi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar:

1. Belanja Pemerintah Pusat

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1,09 triliun atau mencapai 14,54%. Adapun rincian serapan per jenis belanja adalah sebagai berikut:

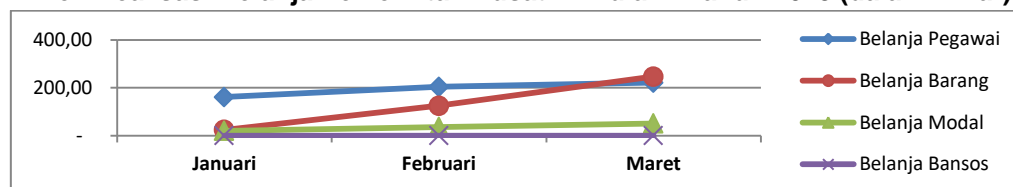
Grafik II.4
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. Triwulan I Tahun 2018 (dalam Miliar)



Sumber: GFS dan OM SPAN (diolah)

Adapun tren penyerapan per bulan untuk masing masing jenis belanja dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik II.5
Tren Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I Tahun 2018 (dalam Miliar)



Sumber: GFS dan OM SPAN (diolah)

Dari kedua grafik di atas, serapan Belanja Pegawai dan Belanja Barang sudah sesuai yang ditargetkan. Namun untuk Belanja Modal, serapannya (6,25%) masih belum mencapai target minimal untuk triwulan I sebesar 15%. Selain itu, tren serapan Belanja Modal per bulannya juga tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi ini bisa menggambarkan bahwa sebagian besar Satuan Kerja masih dalam kondisi menyiapkan kontraknya. Seharusnya hal tersebut sudah bisa dilakukan pada akhir tahun 2017 dan pada triwulan I 2018 sudah dapat dilakukan pembayaran uang muka pekerjaan 20%-30%.

Apabila diklasifikasikan per fungsi, alokasi fungsi pendidikan sudah melebihi 20%. Adapun alokasi fungsi kesehatan baru sebesar 3,56%. Tentunya pemenuhan alokasi kesehatan 5% juga harus dibantu dari APBD. Adapun rincian alokasi belanja pemerintah pusat per fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel II.4
Belanja Pemerintah Pusat Per Fungsi s.d. Triwulan I Tahun 2018 (dalam Miliar)

FUNGSI	Pagu	% Pagu	realisasi	% Real
04. EKONOMI	2,346	31.30%	212	9.07%
10. PENDIDIKAN	1,738	23.18%	311	17.93%
03. KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1,445	19.28%	286	19.83%
01. PELAYANAN UMUM	503	6.71%	77	15.49%
02. PERTAHANAN	467	6.24%	95	20.43%
06. PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	331	4.42%	15	4.67%
07. KESEHATAN	267	3.56%	31	11.65%
09. AGAMA	192	2.56%	35	18.48%
05. LINGKUNGAN HIDUP	166	2.22%	18	11.14%
11. PERLINDUNGAN SOSIAL	40	0.54%	5	12.66%
08. PARIWISATA	-	0.00%	-	0.00%
Jumlah	7,498	100%	1,090	14.54%

Sumber: GFS dan OM SPAN (diolah)

2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Alokasi TKDD tahun 2018 untuk wilayah Kalimantan Selatan sebesar Rp16,5 triliun atau 69% dari seluruh alokasi APBN untuk Kalimantan Selatan. Hal itu

menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dengan harapan pembangunan dapat dilakukan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan/prioritas daerah.

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, realisasi TKDD sebesar Rp4,1 triliun atau sudah mencapai 24,97%. Kondisi ini cukup baik karena di atas target minimal 15%. Selain itu, serapan triwulan I 2018 juga melampaui serapan triwulan I 2017 yang hanya sebesar Rp3,9 triliun atau 17,71% dari pagu.

Lebih baiknya serapan TKDD tersebut karena pada triwulan I 2018 sudah ada penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN setempat, telah memberikan dampak positif.

Adapun rincian penyaluran TKDD sampai dengan triwulan I tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5
Realisasi TKDD s.d. Triwulan I Tahun 2018 (dalam Miliar)

TKDD	Januari	Februari	Maret	Jumlah
DAU	1,302	662	686	2,650
DBH	544	23	70	637
DAK Fisik	0	0	13,7	14
DAK Non Fisik	0	12,8	348	361
DID	0	0	113	113
Dana Desa	26,5	220	107	354
Jumlah	1,873	917	1,338	4,128

Sumber: GFS dan OM SPAN (diolah)

3. Pengelolaan BLU

Satker yang menerapkan PPK BLU di wilayah Kalimantan Selatan hanya ada 1 satker, yaitu Satker BLU RS Bhayangkara Kelas III Banjarmasin.

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, realisasi pendapatan BLU sudah mencapai 20,6% dari target pendapatan atau sebesar Rp6,8 miliar, dengan rincian Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp6,7 miliar, Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha sebesar Rp17,9 juta dan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU sebesar Rp42,4 juta. Adapun realisasi belanja BLU sudah mencapai 22,11% atau sebesar 9,1 miliar dari pagu sebesar Rp41,3 miliar.

Apabila dilihat dari sumber pendanaan untuk belanjanya, Satker BLU RS Bhayangkara Kelas III Banjarmasin dapat dikategorikan sebagai satker BLU

mandiri. Sebagian besar belanjanya dibiayai dari pendapatan BLU (85%), dengan rincian sebagai berikut:

Grafik II.6
Komposisi Pendanaan BLU RS Bhayangkara Kelas III Banjarmasin Tahun 2018



Sumber: GFS dan OM SPAN (diolah)

Tantangan utama dalam pengelolaan BLU adalah belum dilakukannya diversifikasi pendapatan BLU. Sampai dengan saat ini, hampir seluruh pendapatan BLU (99%) bersumber dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit. Dasar pemungutan jasa layanan RS Bhayangkara Banjarmasin adalah PMK Nomor 76/PMK.05/2016. Meskipun tarif layanan RS Bhayangkara Banjarmasin dinilai masih kompetitif, namun perlu dilakukan penilaian ulang untuk mengidentifikasi apakah masih ada tarif layanan yang masih jauh di bawah harga pasar, terutama layanan yang sifatnya tidak menyangkut masyarakat umum, serta tarif kerja sama pemanfaatan aset. Melihat data penerimaan hasil kerja sama masih sangat kecil, bahkan di bawah bunga jasa giro, tentunya masih perlu digali potensi kerja sama aset atau manajemen untuk menambah jumlah dan jenis pendapatan BLU.

Selain itu, tantangan lainnya adalah perlu terus ditingkatkan upaya efisiensi biaya operasional layanan, dan upaya untuk semakin mengenalkan layanan RS Bhayangkara sebagai RS POLRI yang juga melayani umum, terutama kepada dunia usaha di Kalimantan Selatan.

4. Manajemen Investasi Pusat

Sampai dengan triwulan I tahun 2018, alokasi KUR (kumulatif) di Kalimantan Selatan sudah tersalur sebesar Rp4,7 triliun kepada 195.581 debitur. Kota Banjarmasin merupakan wilayah penyaluran KUR terbesar baik dari jumlah akad/penyaluran maupun jumlah debitur. Rincian selengkapnya sebaran penyaluran KUR di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel II.6
Penyaluran KUR (Kumulatif) se- Kalimantan Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2018

KABUPATEN/KOTA	AKAD (Miliar)	%	DEBITUR (orang)	%
BANJARMASIN	1,069	22%	44,645	23%
TANBU	480	10%	14,656	7%

KABUPATEN/KOTA	AKAD (Miliar)	%	DEBITUR (orang)	%
BANJAR	462	10%	20,140	10%
TALA	444	9%	16,035	8%
TABALONG	322	7%	14,064	7%
KOTABARU	311	6%	11,215	6%
HST	301	6%	13,026	7%
BANJARBARU	290	6%	10,135	5%
HSU	276	6%	12,271	6%
TAPIN	240	5%	10,558	5%
BATOLA	232	5%	9,833	5%
HSS	187	4%	10,168	5%
BALANGAN	178	4%	8,835	5%
JUMLAH	4,792	100%	195,581	100%

Sumber: SIKP (diolah)

Adapun berdasarkan sebaran per sektor usaha, sektor terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran. Rincian selengkapnya sebaran KUR per sektor usaha adalah sebagai berikut:

Tabel II.7
Penyaluran KUR (Kumulatif) per Sektor Usaha s.d. Triwulan I Tahun 2018

SEKTOR USAHA	AKAD (Miliar)	%	DEBITUR (orang)	%
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	2.776	58%	113,852	58%
PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	1.270	26%	54,781	28%
JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN	230	5%	10,392	5%
INDUSTRI PENGOLAHAN	169	4%	5,715	3%
PERIKANAN	118	2%	3,616	2%
SEKTOR LAINNYA	229	5%	7,225	4%
Jumlah	4.792	100%	195,581	100%

Sumber: SIKP (diolah)

Komposisi penyaluran per Kabupaten/Kota dan per Sektor Usaha tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar KUR masih tersalur di kawasan perkotaan (kota Banjarmasin) yang memiliki karakteristik kota dagang, sehingga sektor usaha terbesar penerima KUR juga merupakan sektor usaha perdagangan. Tantangan penyaluran KUR ke depan adalah bagaimana upaya untuk lebih meratakan penyaluran ke kabupaten/kota lainnya serta ke jenis usaha lainnya misalnya sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan.

Sebagai pelengkap KUR, pemerintah telah mengenalkan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Tujuan UMi adalah untuk memfasilitasi UMKM yang sampai dengan saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan formal dari perbankan. Diperkirakan masih ada 71% UMKM yang belum bisa mendapatkan KUR. Sampai dengan triwulan I tahun 2018, telah tersalur UMi

(kumulatif) sebesar 4,3 miliar untuk 1.614 debitur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.8
Penyaluran UMi (Kumulatif) s.d. Triwulan I Tahun 2018

Penyalur UMi	Nominal	Debitur
Permodalan Nasional Madani (PNM)	2,653,500,000	1,324
PT. Pegadaian	1,589,200,000	231
Koperasi Mitra Duafa (Komida)	110,100,000	58
Koperasi Syariah BUS	1,500,000	1
Jumlah	4,354,300,000	1,614

Sumber: Direktorat SMI (diolah)

Tantangan penyaluran UMi adalah masih relatif tingginya suku bunga/imbal jasa yaitu dalam kisaran 11%-25%, masih jauh di atas suku bunga KUR yang hanya 7%. Oleh karena itu perlu disosialisasikan ke masyarakat bahwa antara KUR dan UMi adalah saling melengkapi. Bagi UMKM yang sudah memenuhi syarat KUR (misalnya agunan tambahan dan NPWP) diarahkan untuk mengambil KUR. Adapun UMKM yang tidak bisa memenuhi persyaratan KUR, dapat mengambil UMi.

C. Prognosis Realisasi APBN

Metodologi yang digunakan dalam melakukan perkiraan realisasi baik pendapatan maupun belanja sampai dengan akhir tahun 2018 yaitu dengan Analisis *trend* atau *forecasting* pelaksanaan anggaran atas data realisasi baik pendapatan maupun belanja APBN selama 5 periode tahun sebelumnya. Dari analisis tersebut diperoleh gambaran perkiraan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.9 **Perkiraan Realisasi APBN s.d. Triwulan IV Tahun 2018 (dalam miliar)**

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	%	Rp	%
Pendapatan Negara	9.063	1.674	18,47%	7.250	80%
Belanja Negara	24.031	5.218	21,71%	21.628	90%
Surplus/Defisit	(14.968)	(3.544)		(14.378)	

Dari tabel di atas, perkiraan atas pendapatan APBN sampai dengan triwulan IV 2018 diperkirakan mencapai 80% dari target yang ditetapkan. Perkiraan tersebut berdasarkan analisis tren dengan asumsi moderat. Sedangkan untuk belanja APBN diperkirakan 90% dari pagu. Hal ini terkait dengan kebijakan efisiensi belanja yang dilakukan oleh Pemerintah mengingat penerimaan perpajakan tidak mencapai 100%.

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Gambaran realisasi APBD sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 secara agregat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.1 Realisasi APBD secara agregat Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018

(dalam miliar Rp)

Uraian	2017	2018
A. PENDAPATAN	4.195,54	4.412,24
I. Pendapatan Asli Daerah	774,11	839,53
1. Pendapatan Pajak Daerah	547,57	705,52
2. Hasil Retribusi Daerah	23,28	32,27
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	0,21	0,50
4. Lain-Lain PAD yang Sah	203,05	101,24
II. Pendapatan Transfer	3.369,79	3.561,56
1. Dana Perimbangan	3.060,82	3.095,12
a. Dana Bagi Hasil Pajak	155,62	56,14
b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	466,54	546,50
c. Dana Alokasi Umum	2.144,33	2.282,96
d. Dana Alokasi Khusus	294,33	209,52
2. Dana Penyesuaian	147,22	444,44
3. Transfer Pemda Lainnya	161,75	22,00
III. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	51,64	11,15
1. Pendapatan Hibah	10,40	8,69
2. Pendapatan Lainnya	41,24	2,46
B. BELANJA	2.278,24	2.296,13
I. Belanja Operasi	1.871,27	2.007,05
1. Belanja Pegawai	1.224,83	1.333,12
2. Belanja barang dan Jasa	518,10	581,26
3. Subsidi	27,59	0
4. Hibah	97,35	90,62
5. Bantuan Sosial	3,40	2,06
II. Belanja Modal	169,77	135,32
III. Belanja Tak Terduga	0	0
C. TRANSFER PEMDA	237,20	153,76
SURPLUS/DEFISIT	1.917,30	2.116,11

Sumber: GFS Kanwil DJPb Provinsi Kalsel (diolah)

Surplus secara agregat di Provinsi Kalsel pada Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp2.116,11 miliar, lebih besar jika dibandingkan pada triwulan yang sama tahun lalu sebesar Rp1.917,30 miliar. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya Pemda se-Kalimantan Selatan dalam membelanjakan anggaran, mengingat berdasarkan pagu APBD secara agregat direncanakan defisit sebesar Rp189,25 miliar sampai akhir tahun.

A. Pendapatan Daerah

Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada APBD dibagi dalam tiga bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2018 secara agregat sebesar Rp4.412,24 miliar atau 19,09 persen dari total pagu sebesar Rp23.111,78 miliar.

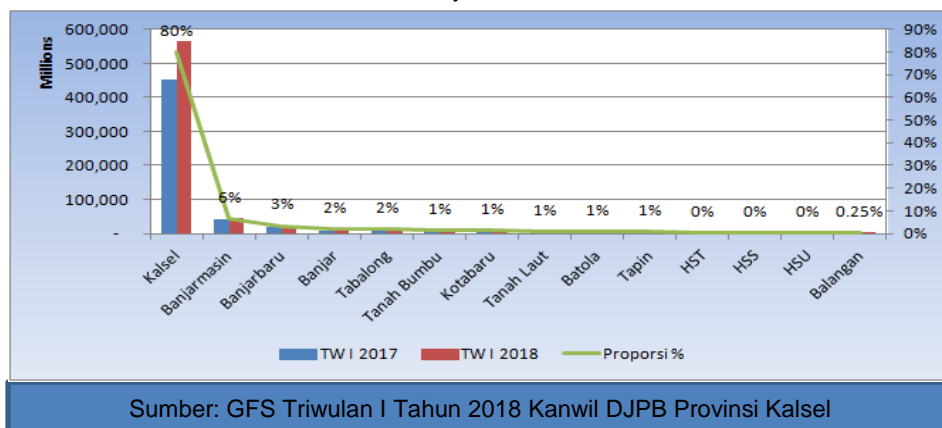
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 secara agregat di Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pajak Daerah merupakan pendapatan tertinggi dari PAD yaitu sebesar 84 persen atau Rp705,52 miliar dari PAD sebesar Rp839,53 miliar. Sementara itu pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan terkecil dari PAD yaitu sebesar Rp0,50 miliar atau 0,1 persen dari total PAD.

a. Penerimaan Pajak Daerah

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan secara agregat sebesar Rp705,52 miliar atau 124,42 persen dibandingkan triwulan I Tahun 2017 sebesar Rp567,03 miliar.

Grafik 3.1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I 2017 dan 2018



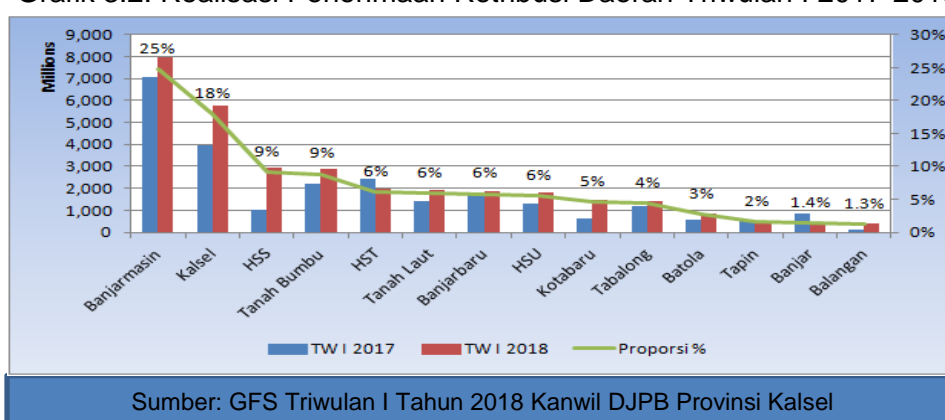
Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan disumbang tertinggi oleh Pemerintah Provinsi sebesar Rp563,89 miliar atau 80 persen dari seluruh penerimaan Pajak Daerah. Sementara Kabupaten Balangan penyumbang terkecil, yaitu sebesar Rp1,78 miliar atau 0,25 persen. Pajak BBM, PKB dan BBNKB merupakan penyumbang terbesar penerimaan

Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, masing-masing 42%, 21% dan 17% dari total Penerimaan Pajak Daerah.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan I Tahun 2018 secara agregat sebesar Rp32,27 miliar atau sebesar 129,24 persen dari Triwulan I Tahun 2017 sebesar Rp24,97 miliar. Kota Banjarmasin merupakan yang tertinggi menyumbang penerimaan retribusi yaitu sebesar Rp7,97 miliar atau 25 persen. Sementara Kabupaten Balangan merupakan yang terendah yaitu 1,3 persen atau Rp0,42 miliar.

Grafik 3.2. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan I 2017-2018

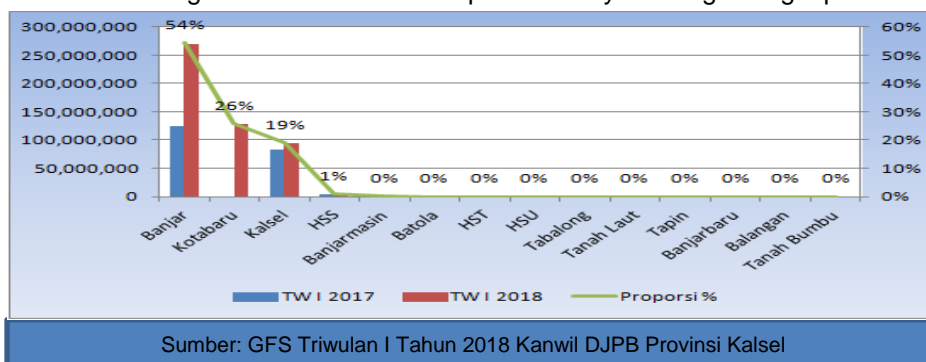


Retribusi Pelayanan Kesehatan, Persampahan/Kebersihan, IMB dan Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan sumber penerimaan retribusi daerah terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan, masing-masing 20%, 15%, 12% dan 11%.

c. Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Triwulan I Tahun 2018 secara agregat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp0,49 miliar atau sebesar 232,39 persen dari Triwulan I Tahun 2017 sebesar Rp0,21 miliar. Kabupaten Banjar merupakan yang terbesar dalam merealisasikannya, yaitu Rp0,27 miliar atau 54 persen dari total penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sementara itu 9 Pemda belum dapat merealisasikan yaitu Batola, HST, HSU, Tabalong, Tanah Laut, Tapin, Banjarbaru, Balangan dan Tanah Bumbu. Deviden atas penyertaan modal pada PMD/BUMD merupakan penyumbang terbesar Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu 99,05 persen.

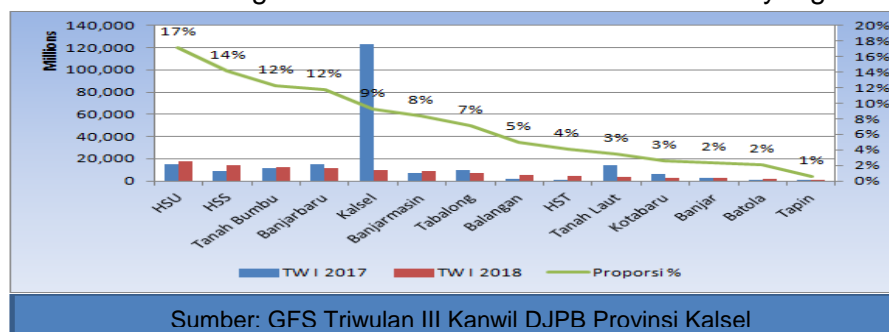
Grafik 3.3. Pagu dan Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Yg dipisahkan



d. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Total Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Triwulan I Tahun 2018 secara agregat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp101,24 miliar atau sebesar 46 persen dari Triwulan I Tahun 2017 sebesar Rp218,21 miliar. Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan yang terbesar dalam merealisasikannya yaitu 17 persen atau Rp17,38 miliar dari total Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah. Kabupaten Tapin merupakan yang terendah, yaitu 1 persen atau sebesar Rp0,5 miliar.

Grafik 3.4. Pagu dan Realisasi Penerimaan Lain-lain yang sah

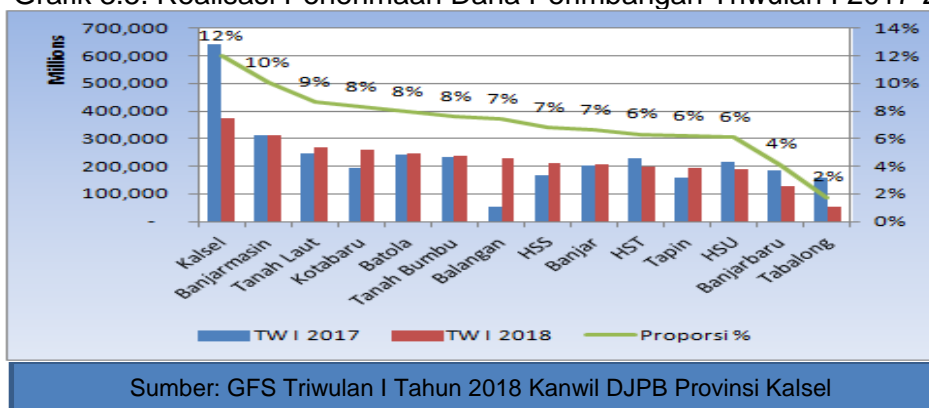


Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendaptan BLUD dan Penerimaan Jasa Giro merupakan penyumbang terbesar dari Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah, masing-masing 32%, 23% dan 14%.

2. Penerimaan Dana Perimbangan

Total Penerimaan Penerimaan Dana Perimbangan Triwulan I Tahun 2018 secara agregat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp3,095 triliun atau sebesar 95 persen dari Triwulan I Tahun 2017 sebesar Rp3,25 triliun. Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang tertinggi dalam Penerimaan Dana Perimbangan yaitu sebesar sebesar Rp371,97 miliar atau 12 persen dari total Dana Perimbangan. Sementara itu, Kabupaten Tabalong merupakan yang terendah, yaitu sebesar 2 persen atau sebesar Rp54,40 miliar dari total pagu sebesar Rp1,46 triliun.

Grafik 3.5. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Triwulan I 2017-2018



Dana Alokasi Umum merupakan yang terbesar sumber Penerimaan Dana Perimbangan, yaitu sebesar Rp2,28 triliun atau 74 persen, disusul Dana Bagi Hasil sebesar Rp602,63 miliar atau 19 persen dan sisanya Dana Alokasi Khusus sebesar Rp209,52 miliar atau 7 persen dari total Dana Perimbangan Triwulan I Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah

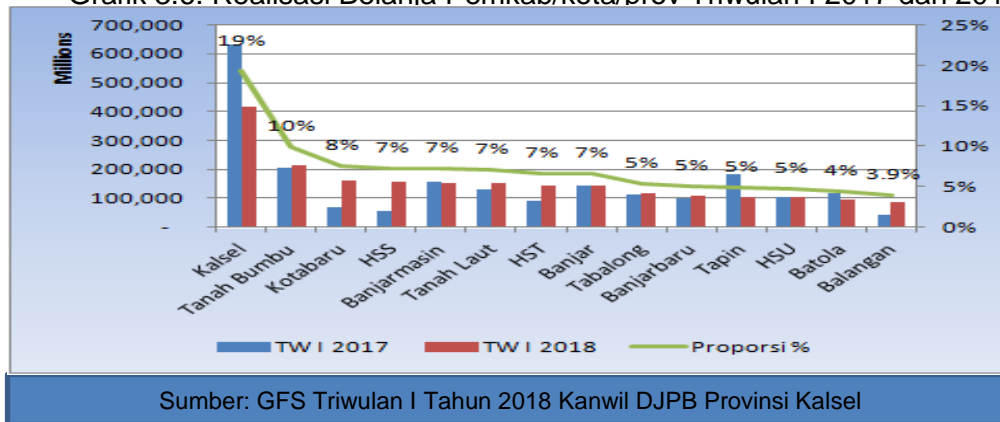
Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah secara agregat di Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp11,15 miliar atau sebesar 22 persen dari Triwulan I Tahun 2017 yang sebesar Rp51,64 miliar, yang disumbang oleh 7 pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang terbesar yang telah terealisasi yaitu sebesar 58 persen atau sebesar Rp6,44 miliar dari total Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sementara itu, 7 pemerintah daerah belum terdapat penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah, yaitu Kabupaten Balangan, Barito Kuala, Banjar, HST, HSU, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Sumber Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah di Provinsi Kalimantan Selatan berasal dari Penerimaan Hibah sebesar Rp8,69 miliar atau 78 persen dan sisanya berasal dari Pendapatan Lainnya sebesar Rp2,46 miliar atau 22 persen.

B. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Triwulan I Tahun 2018 secara agregat di Provinsi Kalimantan selatan sebesar Rp2,144 triliun atau sebesar 97,39 persen dari realisasi triwulan I Tahun 2017 yang sebesar Rp2,515 triliun. Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang tertinggi belanja daerahnya yaitu sebesar Rp415,85 miliar atau sebesar 19 persen dari total belanja Triwulan I Tahun 2018. Sementara

itu, Kabupaten Balangan yang terendah dalam merealisasikan belanjanya, yaitu sebesar 3,9 persen atau sebesar Rp84,13 miliar.

Grafik 3.6. Realisasi Belanja Pemkab/kota/prov Triwulan I 2017 dan 2018



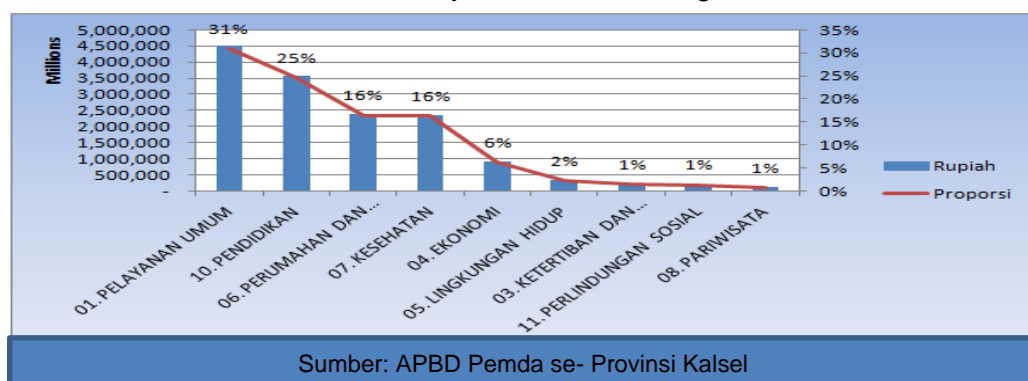
Realisasi Belanja Daerah Triwulan I Tahun 2018 secara agregat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp2,144 triliun atau 10,51 persen dari total pagu sebesar Rp23.301 triliun.

1. Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer
Belanja Operasi merupakan belanja yang tertinggi yaitu sebesar 87 persen atau sebesar Rp2,007 triliun dari total belanja sebesar Rp2,295 triliun. Sementara itu, Belanja Tak Terduga belum ada realisasi.

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Fungsi
Alokasi APBD secara agregat di Provinsi Kalimantan Selatan (Provinsi Kalsel, Tabalong dan Tanah Bumbu belum kirim data), Fungsi Pelayanan Umum merupakan yang tertinggi alokasi dalam APBD yaitu 4,49 triliun rupiah atau 31 persen, sementara Fungsi Pariwisata merupakan yang terendah alokasinya yaitu 108,06 miliar rupiah atau 1 persen.

Alokasi fungsi pendidikan sebesar 25% dan fungsi kesehatan mencapai 16%, sehingga sudah memenuhi alokasi minimal sesuai ketentuan perundang-undangan.

Grafik 3.6. Alokasi Belanja berdasarkan fungsi Tahun 2018



IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Triwulan I 2018 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2018**

(dalam miliar rupiah)

Uraian	2018				2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	1.675	874	2.549	-1,05%	2.576
Pendapatan Perpajakan	1.381	706	2.087	0,97%	2.067
Pendapatan Bukan Pajak	294	160	454	-9,02%	499
Hibah	-	8	8	-20,00%	10
Transfer *)		4.128	-		-
Belanja Negara	1.090	2.296	3.386	-0,88%	3.416
Belanja Pemerintah	1.090	2.142	3.232	-5,39%	3.416
Transfer *)	4.128	154	154	-	-
Surplus/(Defisit)	585	2.706	3.291	-491,79%	- 840
Pembiayaan	-	100	100	-84,20%	633
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	108	108	-83,31%	647
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	8	8	-42,86%	14
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	585	2.806	3.391	-1738%	- 207

Sumber : LKPK Kanwil DJPb (diolah)

Catatan:

*) Seluruh Pengeluaran Transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah

Pada triwulan I 2018, baik pendapatan maupun belanja pemerintah konsolidasian di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan dibandingkan triwulan I tahun 2017. Kondisi ini kurang menguntungkan jika dihubungkan dengan proporsi penyerapan anggaran yang diharapkan pada awal tahun anggaran dan tidak pada akhir tahun, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

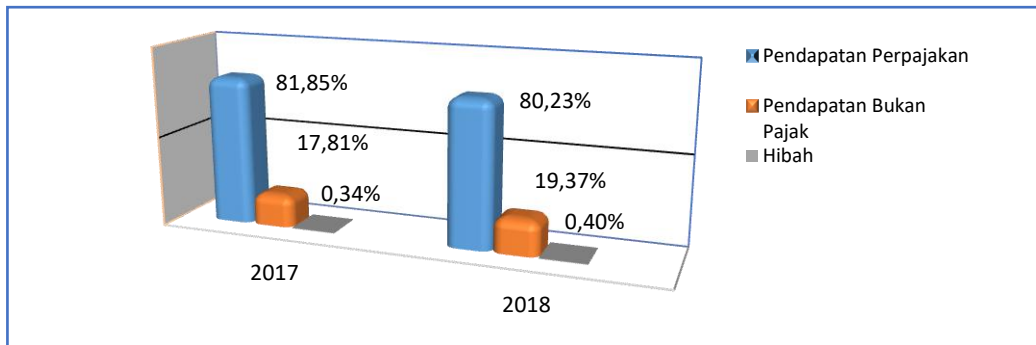
B. Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan negara konsolidasian Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Triwulan I 2018 mencapai Rp2,549 triliun yang terdiri dari pendapatan perpajakan Rp2,087 triliun, pendapatan bukan pajak Rp454 miliar dan hibah Rp8 miliar. Secara total terjadi penurunan 1,05 persen dibanding capaian pada triwulan yang sama tahun sebelumnya.

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Proporsi pendapatan konsolidasian tersaji pada tabel di bawah ini:

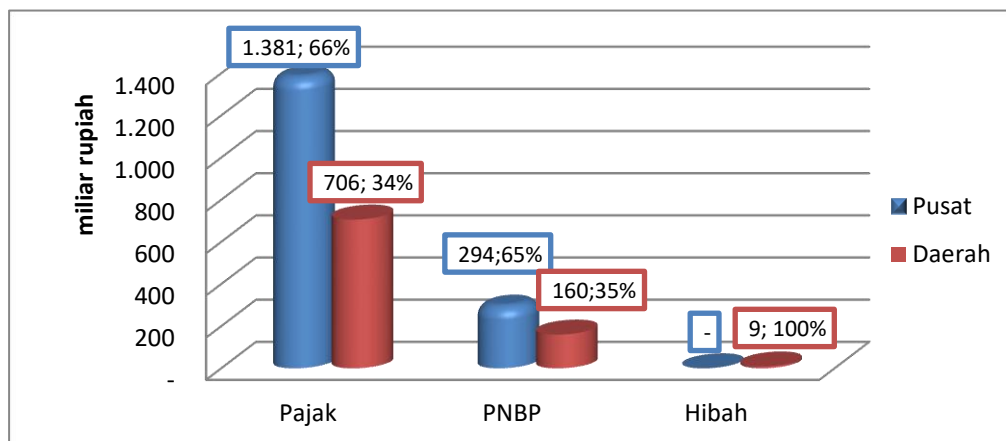
Grafik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2017



Sumber: LKPK Kanwil DJPb (diolah)

Dari grafik diatas, terlihat bahwa proporsi pendapatan konsolidasian di wilayah Kalimantan Selatan triwulan I Tahun 2018 tidak mengalami perubahan yang berarti jika dibandingkan dengan Tahun 2017. Pendapatan konsolidasian masih didominasi pendapatan perpajakan dengan sumbangan sebesar 81,85 persen, selanjutnya proporsi PNBPN 17,81 persen dan hibah 0,34 persen.

Grafik 4.2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2018



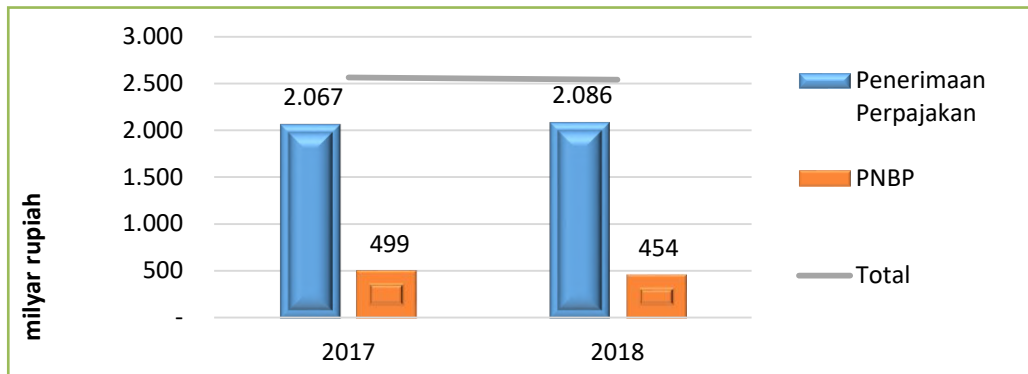
Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Pendapatan perpajakan pada triwulan I 2018 masih didominasi pemerintah pusat sebesar Rp1.381 miliar (66 persen) sementara pajak daerah hanya Rp706 miliar (34 persen). Demikian juga PNBPN Pusat menyumbang porsi 65 persen atau sebesar Rp294 miliar, sementara pemerintah daerah menyumbang porsi 35 persen atau Rp160 miliar. Sampai dengan triwulan I 2018 pemerintah pusat belum mencatat adanya pendapatan hibah, sebaliknya pada pemerintah daerah tercatat sebesar Rp9 miliar.

2. Analisis Perubahan

Perkembangan penerimaan konsolidasian tersaji sebagai berikut:

Grafik 4.3 Perkembangan Penerimaan Konsolidasian Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2018 dan 2017



Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Penerimaan konsolidasian s.d. triwulan I 2018 mengalami penurunan sedikit dibandingkan triwulan yang sama tahun 2017. Penurunan tersebut didorong oleh penurunan penerimaan bukan pajak.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan konsolidasian di Kalimantan Selatan dapat tersaji sebagai berikut:

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 dan 2018 (miliar rupiah)

Uraian	2017		2018	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	2.067	14%	2.086	1%
PNBP	499	27%	454	-9%
Total	2.566	16%	2.540	-1%
PDRB/Pert. Ekonomi	36,61 triliun	5,31%	39,81 triliun	5,01%

Sumber: LKPK Kanwil DJPB, BPS Prov. Kalsel (diolah)

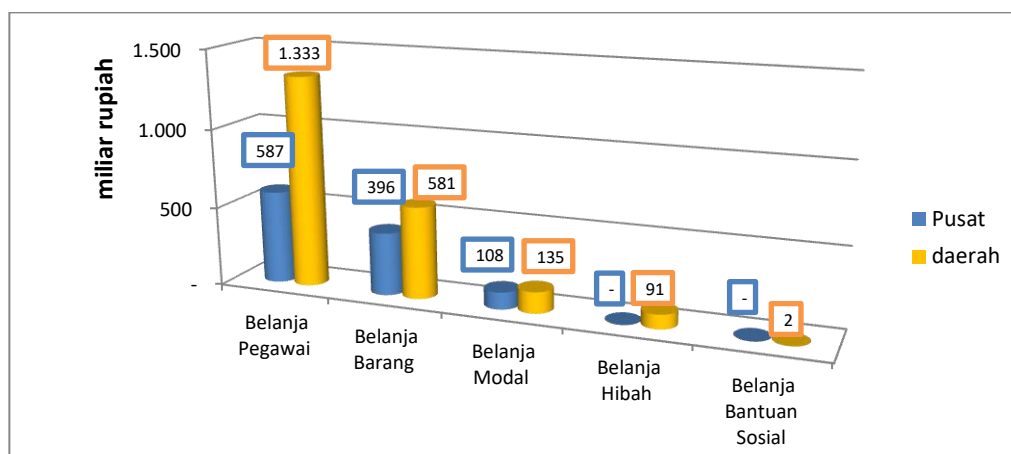
Berdasarkan data BPS, pada triwulan I tahun 2018 PDRB Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp39.81 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen (yoy). Sedangkan pada periode yang sama, pendapatan yang diterima pemerintah konsolidasian tercatat sebesar Rp2,54 triliun atau turun 1 persen dibandingkan pendapatan tahun 2017 sebesar Rp2,57 triliun. Realisasi penerimaan ini belum sebanding dengan peningkatan PDRB, sehingga masih diperlukan upaya keras bagi instansi terkait dengan penerimaan negara/daerah.

C. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Secara umum porsi belanja pemerintah daerah terhadap belanja konsolidasian lebih dominan jika dibandingkan dengan belanja pemerintah pusat. Di luar alokasi belanja transfer, total realisasi belanja pemerintah pusat triwulan I 2018 sebesar Rp1,090 triliun (34 persen) sementara belanja pemerintah daerah sebesar Rp2,142 triliun (66 persen). Dari total belanja tersebut, belanja pegawai memiliki porsi yang berimbang dimana belanja pemerintah pusat sebesar 31 persen dan pemerintah daerah 69 persen. Namun untuk jenis belanja barang dan modal, realisasi pemerintah pusat masing-masing sebesar 41 dan 44 persen sementara pemerintah daerah 59 dan 56 persen. Secara parsial, komposisi belanja pegawai, barang dan modal pemerintah pusat pada triwulan I 2018 masing-masing 54, 36 dan 10 persen. Sementara pemerintah daerah komposisi belanjanya pada angka 62, 27 dan 6 persen. Hal ini menunjukkan realisasi penyerapan belanja instansi pemerintah pusat lebih sesuai dengan kebijakan penyerapan belanja non pegawai pada awal tahun guna peningkatan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.

Grafik IV.4 Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Konsolidasian pada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017

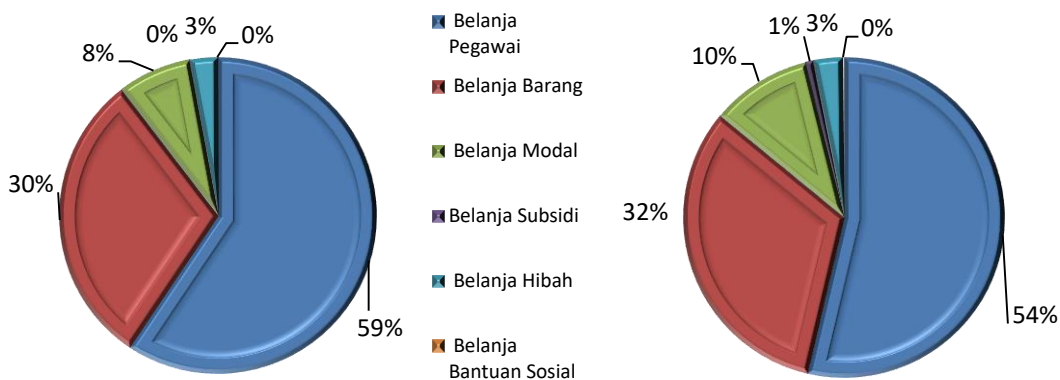


Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

2. Analisis Perubahan

Perubahan realisasi Belanja Konsolidasian triwulan I tahun 2018 dibandingkan triwulan I tahun 2017 tercermin pada grafik IV.5. Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi belanja pegawai pada triwulan I 2018 mengalami kenaikan dibandingkan triwulan I 2017. Penurunan justru terjadi pada kategori belanja barang dan modal dari tahun sebelumnya.

Grafik 4.5 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2018 dan 2017



3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional

Hubungan belanja pemerintah dan indikator perekonomian Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Hubungan Belanja Pemerintah dengan Indikator Ekonomi Regional

Uraian	2017	2018	Perubahan	%
Belanja Pemerintah	3,416 triliun	3,386 triliun	-0,03 triliun	-0,87%
PDRB	36,61 triliun	39,81 triliun	3,20 triliun	8,74%
TPT	3,53	3,86	0,33	9,35%
Kemiskinan	4,70	-	-	-

Sumber : LKPK Kanwil DJPb, BPS (diolah)

Belanja pemerintah pada periode triwulan I 2018 yang turun 0,87 persen direduksi oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan PMTB sehingga nominal PDRB tetap positif, meskipun pertumbuhannya lebih kecil dari tahun sebelumnya. Angka TPT menunjukkan adanya sedikit kenaikan, sedangkan tingkat kemiskinan belum terdapat data tahun 2018. Hal ini disebabkan pada sektor pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbanyak belum memasuki masa panen serta ditunjang penambahan jumlah angkatan kerja baru.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2018.

Tabel IV.4 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian Triwulan I Tahun 2018

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	JUMLAH
	Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto	
A1	Pendapatan:	2.548.399.087.284
A11	Pajak	2.085.852.197.491
A12	Kontribusi sosial	-
A13	Hibah	8.689.873.619
A14	Pendapatan lain	453.857.016.174
A2	Beban:	3.010.117.575.355
A21	Kompensasi pegawai	1.981.757.546.067
A22	Penggunaan barang dan jasa	935.463.308.851
A23	Konsumsi aset tetap	-
A24	Bunga	-
A25	Subsidi	-
A26	Hibah	73.883.728.437
A27	Manfaat sosial	18.956.292.000
A28	Beban Lainnya	56.700.000
NOB	Keseimbangan operasi bruto/neto	(461.718.488.071)
A3	Transaksi Aset Non Keuangan Neto	242.944.936.469
A311	Aset tetap	242.944.936.469
A312	Persediaan	-
A313	Barang berharga	-
A314	Aset nonproduksi	-
NLB	Net Lending/Borrowing	(1.166.381.912.611)
	Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban	
A32	a.Akuisisi Neto Aset Keuangan	(1.166.381.912.611)
A321	- Domestik	(1.166.381.912.611)
A322	- Luar Negeri	-
A33	b.Keterjadian Kewajiban	-
A331	- Domestik	-
A332	- Luar Negeri	-
	SILPA KONSOLIDASIAN	
PDRB Triwulan I 2018		39,81 triliun
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (G) = A21+A22+A23+A27		2.936.177.146.918
Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB		7,37%
PMTB =A311		242.944.936.469
Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDRB		0,6%

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Kontribusi pengeluaran pemerintah sudah cukup tinggi pada angka 7,37%, di sisi lain kontribusi investasi masih kecil (0,6%). Dalam kondisi perekonomian yang cukup baik dengan pertumbuhan **5,01 persen** maka kontribusi Pemerintah dari investasi harus lebih ditingkatkan guna lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang.



V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. Pertumbuhan Ekonomi Kalsel 2018 Menjanjikan

Bank Indonesia (BI) proyeksikan pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berpeluang meningkat di triwulan I Tahun 2018. Prediksi ini didasari dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok di triwulan I Tahun 2018 yang menyentuh angka 6,8 persen (yoy). Hubungan dagang dimaksud didominasi ekspor komoditas batu bara. Faktor lain yaitu meningkatnya permintaan batu bara India untuk keperluan energi serta ditunjang dengan membaiknya harga batu bara di pasar dunia.

Selain itu, komoditi ekspor Kalsel lainnya yaitu karet juga menyumbang potensi peningkatan perekonomian, karena membaiknya pasaran harga karet dunia akibat penurunan produksi karet dari Malaysia dan Vietnam.

Sedangkan untuk komoditas crude palm oil (CPO) diperkirakan justru melemah diiringi pelemahan harga di pasar dunia akibat meningkatnya produksi CPO negara lain. Walaupun berpeluang menguat, faktor perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi tantangan termasuk bagi negara-negara yang memiliki hubungan dagang yang vital dengan Tiongkok termasuk Indonesia dan khususnya Kalsel. (*Sumber Banjarmasinpost*)

B. Program Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Selatan Tahun 2018

Pemerintah telah menetapkan daftar PSN yang akan direalisasikan sebanyak 225 program di tahun 2018. Khusus Kalimantan Selatan terdapat 4 PSN yakni Bandara Syamsuddin Noor, Kawasan Industri Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu, Kawasan Industri Jorong di Kabupaten Tanah Laut dan Pembangunan Irigasi Pitap di Kabupaten Tapin.

Pertumbuhan ekonomi Kalsel tahun 2015-2017 menjadi salah satu pertimbangan PSN dimaksud. Faktor lainnya yaitu adanya ekspor komoditas andalan di Provinsi Kalimantan Selatan seperti harga batu bara, CPO, dan karet yang mulai sedikit naik.

Pemerintah berpendapat bahwa upaya untuk melakukan hilirisasi melalui PSN di atas adalah sebuah keharusan dalam membangun Kalimantan Selatan. Selain memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah, hilirisasi industri daerah juga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja sekaligus membuat pembangunan Kalimantan Selatan lebih merata. (*Sumber Banjarmasinpost*).